

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Agama dan budaya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Agama merefleksikan diri dalam bentuk budaya, dan budaya bertransendensi melalui agama. Interrelasi ini memutlakan satu asumsi bahwa keduanya saling berkaitan mencipta hubungan *simbiosis mutualistik* (Sumbulah, 2012; Khoiruddin, 2015; Faiz, 2020).

Pendidikan merupakan piranti dari budaya dan agama dengan peran dominan dalam hubungan keduanya. Pendidikan menjembatani dalam bentuk pemenuhan unsur-unsurnya, baik sebagai substansi nilai, materi, orientasi, ataupun sebagai konteks dan target pencapaian (Tafsir, 2013). Budaya akan lebih teresapi bagi masyarakat sebagai pelaku budaya itu sendiri melalui jalur pendidikan, sehingga proses keduanya memunculkan perilaku tertentu yang diakui secara komunal dengan segala implikasi di dalamnya, termasuk fanatisme hingga konflik sosial (Tule, 2000).

Konflik sosial, sebagaimana pandangan Karl Marx, seringkali muncul sebagai akibat adanya kesenjangan yang bersumber pada faktor ekonomi, hingga melahirkan kelas-kelas sosial antara proletar dan borjuis, dua kelas sosial yang bersifat diametral dan subordinatif (Brewer, 2016). Di luar faktor ekonomi ini, emosi keagamaan menjadi bagian paling serius dalam memunculkan konfrontasi, konflik dan ketidaknyamanan dalam masyarakat (Farihah, 2015; Panae dan Islahuddin, 2020). Absolutisme, ekstremisme dan fanatisme adalah contoh irisan yang memungkinkan konflik itu terjadi. Ruang lingkup yang dimilikinya tidak hanya antar agama tapi juga intra agama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam satu agama yang sama (Hanafi, 2018; Karlina Supelli, 2013).⁶

Salah satu contoh konkret dalam hal konflik antar kelompok dalam satu agama ini adalah konflik NU vs Syi'ah yang terjadi di Sampang Madura (Ulum, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Yasin Nurfalah dari Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri menyatakan bahwa kasus Syi'ah Sampang adalah salah satu bukti yang menegaskan bahwa konflik sosial itu tidak selalu karena faktor

ekonomi tapi juga berasal dari bagian yang diasumsi sebagai jalan damai oleh masyarakat, yaitu agama dan budaya (Nurfalah, 2019).

Konflik ini dipicu oleh warga NU dan tokoh-tokohnya yang tidak terima adanya kelompok Syi'ah di sana, Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang. Mereka menginginkan agar ustaẓ Tajul Muluk sebagai pimpinan Syi'ah menghentikan aktivitas keagamaannya apalagi mengajak masyarakat ikut bergabung di dalamnya, karena ajaran yang dipegangnya itu dinilai menyimpang (Mahbub, 2018). Puncaknya terjadi pada peristiwa maulid yang hendak diadakan oleh kelompok Tajul Muluk yang mendapat respon penolakan dan kemudian diblokade oleh kelompok NU karena dinilai tidak mengindahkan permintaan mereka dan diklaim sebagai pelanggaran kesepakatan (Hamdi, 2012).

Konflik yang hampir sama juga terjadi antara warga NU dengan kelompok lainnya yang pada awalnya berkaitan dengan *'amaliyah an-nahḍiyah*. Salah satu kasus yang paling dekat dengan peneliti adalah tetangga peneliti sendiri yang semasa hidupnya tidak mau dengan tahlilan ketika ada tetangga lain yang meninggal. Ironinya, ketika dia sendiri yang meninggal sebagian besar masyarakat sekitar seperti kompak melakukan hal yang sama, tidak mau bertakziah dan melakukan tahlil atasnya dengan alasan bahwa yang bersangkutan tidak mau dengan *'amaliyah* itu.

Selain itu, berdasarkan penuturan warga sekitar SDI Muhammadiyah Waru, sebagian besar masyarakat di sana tidak mau melakukan ṣalat jama'ah di masjid Muhammadiyah yang berlokasi di SD itu, termasuk untuk ṣalat jum.,at. Mereka lebih memilih masjid yang lebih jauh yang dianggap berafiliasi pada NU. Hal ini dipicu oleh karena penolakan terhadap *'amaliyah an-nahḍiyah* seperti qunut tahlil, ziarah kubur, tawassul, maulid dan semacamnya yang dianggap *bid'ah* dan sesat, pokok persoalan sosial keagamaan dalam interrelasi NU dengan organisasi lainnya yang terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia (Alfandi, 2013; Fajarini, 2014; Rofiah, 2016).

Pada dasarnya, konflik sosial seperti ini masih banyak terjadi di Madura sekalipun di bagian yang lain sudah mulai ada yang melebur dan saling menerima. Di antara bukti gesekan lain yang tidak sehat yang dipicu oleh sebab yang sama

adalah kenyataan dari pengalaman awal masa peneliti kuliah S1 di STAIN Pamekasan pada tahun 2003, bahkan sampai dengan saat ini, saat status kampus ini sudah berubah menjadi IAIN Madura, kasus ini masih saja terjadi. Peneliti harus menyaksikan kakak tingkat melakukan dogmatisasi bahwa organisasi yang benar adalah PMII karena secara ideologis NU, dan HMI salah (untuk tidak mengatakan sesat) karena dianggap menjadi *underbow* dari Muhammadiyah walaupun secara geneologi tidak demikian adanya.

Kasus yang tidak jauh berbeda terjadi pada salah satu kader HMI di sekitar tahun 2016 lalu. Dia merupakan mahasiswa dari peneliti sendiri. Dia menuturkan bahwa dirinya harus menghadapi ancaman tidak akan dibiayai kuliah hanya karena mengikuti program latihan kader 1 (LK1) HMI STAIN Pamekasan dengan sebab yang sama yaitu “HMI adalah Muhammadiyah”. Dia menghadapi pilihan dilematik antara bergabung dengan HMI atau tidak lanjut studi.

Secara konseptual, seharusnya perbedaan pemahaman agama tidak menjadi pemicu terjadinya konflik sosial. Hal ini dikarenakan Islam telah mengajarkan bahwa *ikhtilaf* itu adalah *sunnatullah* dan bisa membawa *rahmah* dengan syarat harus disikapi secara etis (Abshor dan Khotimah, 2020). Rasulullah sendiri memaklumi saat terjadi perselisihan di antara para sahabat mengenai shalat asar di kampung *Bani Quraidah* dengan membenarkan semuanya (Al-Bukari, n.d.). Ini persoalan wajib yang perintahnya sangat mutlak. Bagaimana dengan ‘*amaliyah-amaliyah* yang bersifat sunah? tentu akan menjadi lebih lunak, karena secara mendasar melakukan ataupun tidak melakukannya sama-sama tidak diancam dengan siksa (Suryani, 2019).

Dialog Rasulullah dengan Mu‘adz bin Jabal berkaitan dengan kemungkinan apa yang akan dilakukan Mu‘adz di daerah yang dipimpinnya juga menjadi cerminan bahwa ijtihad yang memungkinkan munculnya perbedaan dengan yang lain sangat dihargai. Hal ini sudah sangat jelas tergambar dalam tradisi ijtihad ulama maʿzhab antara imam Hanafi, Maliki, Syafi‘i dan Hambali yang identik dengan pandangan-pandangan *ikhtilafi* (Al-Thabari, n.d.). Bahkan, imam Malik menolak permintaan *Khalifah al-Mansur* yang hendak menjadikan kitab *al-Muwatta‘a* karangannya sebagai hukum kekhalifahan *Abbasiyah* waktu itu karena menjunjung tinggi perbedaan ini (Mas'ud, 2014).

Namun dalam kenyataannya, perbedaan pemahaman agama setelah masa-masa *mujtahid* ini seringkali menjadi penyebab terjadinya konflik sosial yang menciptakan irisan tajam dalam kehidupan sosial masyarakat sebagaimana sebagian telah digambarkan pada bagian sebelumnya. Mengapa ini bisa terjadi? Di antara faktor yang dinilai sangat kuat dalam konteks ini adalah sikap apriori yang cenderung membenarkan yang satu dan menyalahkan lainnya di satu sisi dan fanatisme terhadap individu, maʒhab dan golongan disisi yang lain (Zuhdi, 2019).

Ironinya kasus-kasus seperti ini terjadi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum yang tidak memiliki pengertian tinggi dalam memaknai hidup dan dinamikanya, tapi juga melibatkan kaum elit terdidik, tokoh dan *asatiʒ* yang sangat berpengetahuan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam seperti LP Maʼarif NU sebagai media internalisasi nilai-nilai keorganisasian dan keagamaan sekaligus berpotensi dicurigai sebagai salah satu penyebab kasus seperti ini terjadi.

Hal ini karena dalam praktik pendidikan keagamaan saat ini, titik perbedaan pemahaman justru menjadi salah satu materi khas yang dikembangkan untuk menguatkan identitas kelompok, golongan, aliran, maʒhab dan seterusnya, misalnya di lembaga pendidikan Muhammadiyah ada materi ISMU/AIK yang berisi tentang cara pandang Muhammadiyah dalam berorganisasi dan beragama (Badrut Tamam, Robiah Al-Adawiyah, 2017; Amirudin, 2016; Syamsul Arifin, 2015; Suliswiyadi, 2015). Pada lembaga pendidikan di bawah naungan Maʼarif NU ada materi Aswaja yang berisi tentang cara pandang NU dalam berorganisasi dan beragama pula (Dawud Hasan, 2019; Jayanti, 2017). Hal ini di satu sisi penting untuk menjaga eksistensi organisasi, namun di sisi lain akan dapat menimbulkan ketegangan antar organisasi jika tidak disikapi dengan benar.

Bagi NU, lembaga pendidikan Maʼarif merupakan lembaga pendidikan yang dimilikinya untuk mensosialisasikan nilai-nilai yang dipedomani dan dirujuknya. Unsur paling penting dalam sosialisasi ini adalah haluan organisasi dan *ʼamaliyah* NU yang dimasukkan dalam kurikulum melalui mata pelajaran pendidikan Aswaja ke-NU-an.

Mata pelajaran pendidikan Aswaja Ke-NU-an yang merupakan materi wajib dalam lembaga pendidikan Islam Maʼarif Nahdatul Ulama menjadi media

konstruksi ajaran ke-NU-an yang diterapkan di semua lembaga pendidikan yang berafiliasi pada NU. Secara konseptual, hal ini bersandar pada penegasan bahwa pengetahuan pasti didapat melalui proses konstruksi (Beilharz, 2016). Kondisi ini berarti bahwa masyarakat memiliki banyak kemungkinan adanya ideologisasi dan dogmatisasi dalam dunia pendidikan mereka sehingga melahirkan fanatisme, lalu konflik sosial.

Penelitian yang dilakukan Toto Suharto tentang ideologisasi dunia pendidikan memberikan landasan tentang proses konstruksi ini. Ia mengutip konsepsi Gerald L. Gutek bahwa internalisasi ideologi dalam dunia pendidikan bisa terwujud dalam tiga bentuk; Pertama, dalam penentuan kebijakan serta tujuan pendidikan. Kedua, dalam *hidden curriculum* atau penyampaian nilai-nilai yang tersembunyi. Ketiga, dalam formulasi kurikulum itu sendiri. Ketiga aspek ini sangat dipengaruhi oleh ideologi pendidikan yang dianut oleh komunitas suatu lembaga pendidikan (Suharto, 2014).

Hasil penelitian yang disimpulkan oleh Toto Suharto menyebutkan bahwa NU merupakan organisasi yang moderat dan menghargai pluralitas bangsa karena secara prinsip NU berpegang pada *Tawassuf, Tawazun, i'tidal* dan *Tasamuh* sebagai prinsip dan ideologi organisasi (Suharto, 2014). Hal ini menegaskan bahwa NU yang dikenal sebagai organisasi pengusung Islam nusantara terbuka dengan perbedaan sehingga pada ranah paham dan ajarannya NU bersifat ideal, fleksibel dan jauh dari ajakan konflik (Murtaufiq, 2018). Apalagi dalam buku pegangan pendidikan Aswaja ke-NU-an kader NU diajarkan tentang pluralisme, inklusivisme, multikulturalisme, dan pentingnya *ukhuwah* baik *islâmiyah*, *insâniyah* ataupun *waṭaniyah*.

Namun demikian, fakta mengenai permasalahan sosial di atas tidak bisa diingkari. Semuanya nyata terjadi di masyarakat, sehingga peneliti memiliki asumsi bahwa pelajaran pendidikan Aswaja yang disampaikan oleh guru dalam kelas turut menjadi faktor penopang munculnya permasalahan sosial di masyarakat, lebih-lebih karena faktor subjektivitas guru yang memiliki fanatisme tinggi. Hal ini memungkinkan idealitas organisasi dalam sistem pembelajarannya tercederai, memunculkan disorientasi serta kondisi kontraproduktif yang mengarah pada konflik sosial.

Pada dasarnya, proses konstruksi dalam konteks pembelajaran Aswaja ini memuatkan keterlibatan guru dalam menyampaikan nilai-nilai ideologis yang berkaitan dengan organisasi. Guru menjadi sosok vital yang mengarahkan, membimbing dan memberi penafsiran tentang nilai dan ideologi organisasi sehingga bisa tersampaikan, dipahami, dipercayai dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari (Gutek, 2016; Samad, 2013).

Secara proses, pendidikan menjadi lokus pengetahuan, tempat konstruksi itu terjadi, di dalamnya mengalir pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses ini secara konstan terjadi melalui media yang sangat subjektif antara guru dan murid. Guru melakukan transfer pengetahuan dan murid menerimanya sebagai kebenaran. Pada gilirannya muridpun akan menjadi bagian penting dari proses transfer itu, baik berprofesi sebagai guru juga ataupun menempati posisi lainnya dalam struktur sosial masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Didin Wahyudi menyebutkan bahwa internalisasi nilai-nilai Aswaja di MA Ma'arif NU kota Blitar dan SMA Diponegoro dilakukan guru dengan indoktrinasi. Penelitian ini memang berbicara tentang peluang pendidikan Aswaja dalam menangkal radikalisme, tetapi jawaban pada sebagian rumusan masalahnya yang mempertanyakan tentang internalisasi nilai-nilai Aswaja ke-NU-an pada siswa, ditemukan jawaban bahwa guru melakukan indoktrinasi dan pembiasaan untuk menumbuhkan fanatisme (Wahyudin, 2017).

Pemahaman semacam ini bertalian dengan eksklusivitas berorganisasi bahwa pemaknaan guru tentang materi yang disampaikannya di kelas akan melekat dalam pemahaman siswa dan dipedomani sebagai pedoman ideal dalam konteks sosial mereka, bahkan diposisikannya sebagai satu-satunya pedoman yang benar dan menolak yang lain (Hermawansyah, 2019).

Posisi guru yang sentral dalam konteks perilaku siswa memudahkan pemahamannya diterima dengan baik karena bagi siswa, guru tidak hanya diposisikan sebagai pengajar yang bertugas sebatas menjalankan *transfer of knowledge* tapi juga teladan yang dipedomani semua perbuatan dan perkataannya (Suryana, 2013). Rumus identifikasi tentang apakah yang dikatakan guru masuk pada bagian subjektivitasnya atau memang idealitas ideologi organisasi belum

terbaca dengan baik, sehingga kemungkinan yang paling besar adalah membenarkan dan mengikutinya.

Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji tentang konstruksi pemikiran, pengalaman dan pemkanaan guru Aswaja dalam pembelajaran pendidikan Aswaja ke-NU-an, apakah mengarah pada pemikiran yang moderat ataukah sebaliknya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi pemikiran guru Aswaja tentang *ikhtilaf* dalam pembelajaran pendidikan Aswaja ke-NU-an di Madura?
2. Bagaimana pengalaman guru Aswaja dalam mengajarkan *ikhtilaf* pada pembelajaran pendidikan Aswaja ke-NU-an di Madura?
3. Bagaimana Pemaknaan Guru Aswaja tentang *Ikhtilaf* dalam Pembelajaran Pendidikan Aswaja ke-NU-an di Madura?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami konstruksi pemikiran guru Aswaja tentang *ikhtilaf* dalam pembelajaran pendidikan Aswaja ke-NU-an.
2. Untuk memahami pengalaman guru Aswaja dalam mengajarkan *ikhtilaf* pada pembelajaran Aswaja ke-NU-an.
3. Untuk memahami pemaknaan guru Aswaja tentang *ikhtilaf* dalam pembelajaran pendidikan Aswaja ke-NU-an.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Kemanfaatan penelitian ini berorientasi pada ditemukannya proposisi tentang konstruksi guru mengenai dimensi *ikhtilaf* dalam pendidikan NU di Madura.

2. Praktis

- a. Bagi Guru

Penelitian ini akan menjadi pengetahuan dan acuan evaluasi dalam membentuk pemahaman yang lebih terbuka.

- b. Bagi Lembaga

Bermanfaat untuk evaluasi dan acuan pengembangan program yang berorientasi pada terbentuknya pemahaman guru yang lebih terbuka.

c. Peneliti lain

Penelitian ini akan menjadi teori atau tesis yang menambah pengetahuan di satu sisi, dan pengembangan penelitian lanjutan di sisi yang lain.

E. Penegasan Istilah

1. Konstruksi merupakan bangunan pemahaman bersama mengenai makna (Karman, 2015). Dalam konteks penelitian ini konstruksi dimaksudkan sebagai bangunan pemahaman guru Aswaja tentang *ikhtilaf* yang terdapat dalam pelajaran pendidikan Aswaja ke-NU-an.
2. *Ikhtilaf* bermakna perbedaan pandangan *mujtahid* dalam memahami syariat (Sirajulhuda, 2017). *Ikhtilaf* yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemahaman atau *'amaliyah* Nahdatul Ulama dalam hal *furu'iyah fiqhiyah* yang diperselisihkan oleh organisasi keagamaan yang lain, yaitu; ziarah kubur, tahlil, istighasah, maulid, qunut dan taraweh.
3. Pendidikan Aswaja ke-NU-an merupakan pelajaran keagamaan dan keorganisasian yang menjadi muatan lokal lembaga pendidikan Ma'arif NU khususnya wilayah Jawa Timur yang dalam penelitian ini hanya dibatasi pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat.